

ICW Desak MA Berbenah

Dari Halaman 1

hingga tahun 2024, terdapat 29 hakim yang ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Mereka diduga menerima suap untuk mengatur hasil putusan. Nilai suap mencapai Rp107.999.281.345.

Egi meminta MA untuk memandang mafia peradilan sebagai masalah laten yang harus segera diberantas. MA diminta harus memetakan potensi korupsi di lembaga pengadilan dengan menggandeng Komisi Yudisial (KY), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan elemen masyarakat sipil.

"Mekanisme pengawasan terhadap kinerja hakim dan syarat penerimaan hakim juga perlu diperketat. Ini dilakukan untuk menutup ruang potensi korupsi," ucap dia.

Menurut dia, kasus yang baru saja terbongkar menggambarkan cengkeraman oligarki dalam proses penegakan hukum. Industri kelapa sawit di Indonesia dikuasai oleh segelintir orang dan berbentuk oligopoli, mencakup kelapa sawit mentah hingga minyak goreng.

Beberapa di antaranya adalah Musim Mas Group, Wilmar Group, serta Permata Hijau Group yang tersandung kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

"Oligarki memanfaatkan tata kelola industri sawit yang buruk dengan melakukan perburuan rente (rent-seeking). Praktik itu dilakukan untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan atau legislasi yang menguntungkan industri mereka, contohnya mereka dapat mempengaruhi kebijakan

pemerintah terkait ekspor CPO," ucap Egi.

Korporasi besar itu juga disebut mudah mendapatkan impunitas dari jeratan hukum melalui pemberian suap kepada hakim di perkara korupsi yang tengah dihadapi.

Egi menilai peristiwa tersebut merupakan konsekuensi logis dari pembiaran pemerintah terhadap oligarki kelapa sawit yang kerap dimanjakan melalui berbagai insentif pajak, subsidi, maupun kemudahan perizinan.

"Pemerintah perlu melakukan perbaikan tata kelola industri sawit dari hulu hingga hilir. Ini dapat dimulai dengan moratorium pemberian izin dan ekspansi perkebunan kelapa sawit guna memberantas korupsi," ujarnya.

Egi memandang perlu ada instrumen hukum yang lebih kuat untuk menjerat korporasi dalam kasus korupsi. Wana menurunkan temuan ICW menunjukkan individu berlatar belakang swasta berada pada posisi teratas pelaku korupsi.

Hasil pemantauan tren vonis ICW tahun 2023 menunjukkan 252 pengusaha atau swasta menjalani persidangan kasus korupsi.

Selain itu, dari total 898 terdakwa, pengadilan negeri mendakwa tiga korporasi. Di tingkat pengadilan tinggi, ada 6 korporasi yang disidangkan.

Menurut Egi, pemberantasan korupsi di Indonesia sulit untuk menjerat korporasi selaku subjek hukum. Penegak hukum ragu untuk menggunakan pendekatan vicarious liability untuk menagih pertanggungjawaban pidana korporasi.

"Padahal, pendekatan ini disediakan oleh Pasal 20 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," kata Egi.

Kejagung Bantah Bareskrim

Dari Halaman 1

bahwa peristiwa pemalsuan surat lahan di pagar laut Tangerang tidak menyebabkan kerugian negara.

"Kemudian, terkait dengan kerugian negara, seperti yang disampaikan di beberapa media, setelah kita pelajari berkas perkara, materi itu ada (kerugian negara)," ujar Ketua Tim Peneliti Berkas Jaksa P16 Jampidum, Sunarwan, di Kantor Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (16/4/2025).

Sunarwan menjelaskan, kerugian negara ini terlihat dari adanya kepemilikan negara atas laut di sisi utara Tangerang yang lepas ke tangan pihak lain akibat surat yang diterbitkan oleh para tersangka.

"Adanya laut yang kemudian berubah statusnya menjadi milik perorangan dan kemudian menjadi milik perusahaan. Sehingga, lepaslah kepemilikan negara atas laut tersebut. Nah itulah yang merupakan titik poin kita kenapa kita menyampaikan bahwa itu ada perbuatan melawan hukum, berubahnya status itu," ujar dia.

Lebih lanjut, penerbitan surat lahan ini dilakukan oleh penyelenggara negara, yaitu Kepala Desa Kohod Arsin bin Asip dan jajarannya. Penerbitan surat oleh Arsin disebut sebagai

perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan negara.

"Sejak tingkat kepala desa sampai dengan proses keluarnya SHGB. Di situ ada perbuatan dan semua dilakukan oleh penyelenggara negara. Sehingga, di sini ada perbuatan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara," kata Sunarwan.

Menurut Kejagung, dua indikasi ini dinilai sudah menunjukkan adanya potensi terjadi korupsi. Oleh karena itu, penuntut umum dari Kejaksaan Agung meyakini bahwa kasus yang tengah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Umum (Dittipidum) juga ditangani oleh Kortastipidkor.

Sebelumnya, Kejagung telah mengembalikan berkas pagar laut di Tangerang ini ke Bareskrim Polri pada 14 April 2025 lalu karena Bareskrim menyebut tidak ada korupsi dalam kasus tersebut.

Namun, Bareskrim justru mengirimkan kembali berkas perkara kasus dugaan pemalsuan surat izin di lahan pagar laut di Tangerang tanpa mencantumkan dugaan korupsi. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro mengatakan bahwa pihaknya yakin bahwa kasus ini masih berfokus pada dugaan pemalsuan surat, bukan tindak pidana korupsi.

"Dari penyidik Polri, khususnya melihat

interpretasi teknis dari tata cara pemidanaan korporasi baru disediakan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Pada kasus-kasus korupsi, Perma tersebut masih sangat jarang digunakan penegak hukum.

"Di sisi lain, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana belum mencantumkan ketentuan yang progresif dan komprehensif untuk pemidanaan korporasi," ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap dan atau gratifikasi di balik putusan lepas (ontslag van alle recht vervolging) tiga terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO, sebanyak empat hakim, satu panitera, dua pengacara dan satu pihak swasta ditetapkan sebagai tersangka.

Mereka ialah majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat yang mengadili perkara tiga korporasi (PT Permata Hijau Group, PT Wilmar Group dan PT Musim Mas Group) yakni Djuyamto, Agam Syarif Baharudin dan Ali Muhtarom.

Kemudian mantan Wakil Ketua PN Jakarta Pusat Muhammad Arif Nuryanta; Panitera Muda Perdata PN Jakarta Utara Wahyu Gunawan; serta pengacara korporasi ekspor CPO yakni Marcella Santoso dan Ariyanto Bakri juga diproses hukum.

Terbaru, JAMPIDSUS Kejaksaan Agung resmi menahap Head of Social Security and License Wilmar Group Muhammad Syafei. (cnni/js)

bahwa tindak pidana pemalsuan sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 263 KUHP menurut penyidik, berkas yang kami kirimkan itu sudah terpenuhi unsur secara formal maupun materiil. Artinya, kita sudah hari ini kembalikan dengan alasan-alasan yang tadi kami sampaikan," ujar Djuhandhani saat konferensi pers di Lobi Bareskrim Polri, Kamis (10/4/2025).

Djuhandhani mengatakan bahwa setelah menerima petunjuk dari berkas P19 yang diberikan oleh Kejaksaan Agung, penyidik segera melakukan sejumlah pemeriksaan dan meminta keterangan dari sejumlah ahli, terutama untuk memeriksa ada tidaknya unsur korupsi dalam kasus yang tengah diselidiki.

Penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum telah berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mencari tahu ada tidaknya kerugian negara dalam kasus pagar laut di Tangerang.

"Dari teman-teman BPK, kita diskusikan, kira-kira ini ada kerugian negara di mana ya. Mereka belum bisa menjelaskan adanya kerugian negara," lanjutnya.

Ada tidaknya kerugian negara ini penting karena menjadi salah satu unsur penentu suatu kasus disebut sebagai kasus korupsi atau bukan. (bhi/js)

Jokowi Tolak Tunjukkan Ijazah

Dari Halaman 1

menerima perwakilan massa dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) di kediamannya, Solo, Rabu (16/4/2025).

Jokowi menegaskan, dirinya tak punya kewajiban untuk menunjukkan keaslian ijazahnya kepada massa. Ia hanya mau menunjukkan ijazah tersebut jika diperintahkan pengadilan.

"Alhamdulillah sudah saya terima tadi di dalam rumah. Apapun, beliau-beliau ini ingin silaturahmi,

tentu saya terima dengan baik," kata Jokowi usai menerima perwakilan TPUA.

Jokowi membeberkan dalam pertemuan tersebut perwakilan TPUA memintanya untuk menunjukkan ijazah aslinya. Tapi ia menolak.

"Tidak ada kewajiban dari saya untuk menunjukkan itu kepada mereka, dan juga tidak ada kewenangan mereka untuk mengatur saya untuk menunjukkan ijazah asli yang saya miliki," kata Jokowi.

Meski demikian, ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu menegakkan siap menunjuk-

kan ijazah aslinya jika diperintahkan pengadilan.

"Saya siap untuk datang dan menunjukkan ijazah asli yang ada. Tapi hakim yang meminta. Pengadilan yang meminta," tegasnya.

Menurut Jokowi, Pihak UGM sudah memberikan jawaban yang cukup jelas. Ia memastikan UGM memiliki catatan riwayat pendidikannya di Fakultas Kehutanan UGM.

"Jadi sudah cukup jelas, UGM juga sudah memberikan penjelasan yang gamblang dan jelas," kata Jokowi. (cnni/js)

Polda Sumut Gagalkan Pengiriman

Dari Halaman 1

Reporter: Jafar Sidik

Selanjutnya, personel mendapat informasi identitas kendaraan dan mengikuti mobil Isuzu Panther yang sedang membawa empat korban ke Tanjungbalai.

Polisi langsung menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan. Ditemukan empat orang calon pekerja migran Indonesia ilegal, kernet dan satu sopir.

"Setelah kami ikuti dan hentikan, di dalam mobil ada 4 calon pekerja migran, kernet dan sopir,"

terang Kombes Sumaryono, Rabu (16/4/2025).

Dari sini diperoleh informasi mereka direkrut oleh seseorang bernama Safaruddin alias Udin, yang berhasil ditangkap di Desa Nagur, Kabupaten Sergai.

"Berdasarkan hasil gelar perkara dan bukti yang cukup, penyidik menetapkan Safaruddin alias Udin sebagai terdakwa, serta ditahan," tegas Direktur Reskrim.

Tersangka diduga telah melanggar Pasal 81, subsidair Pasal 83 nomor 18 tahun 2017 tentang pidana bagi orang yang menempatkan pekerja migran Indonesia secara ilegal, dan terancam ku-

rungan penjara 10 tahun, serta denda Rp 15 miliar.

Hasil pemeriksaan mengungkap, para korban membayar uang sebesar Rp 5 juta ke Safaruddin untuk diberangkatkan ke Malaysia.

Para korban diduga akan diberangkatkan ke Malaysia untuk dipekerjakan di rumah makan di Malaysia.

Sedangkan tersangka sudah menjadi agen pembangkitan calon pekerja migran Indonesia ilegal selama 3 tahun.

Selain menangkap tersangka, turut diamankan sejumlah barang bukti 4 paspor, uang tunai dan beberapa barang bukti lainnya. (A-10)

Menteri PU Cabut Aturan soal Satgas

Dari Halaman 1

KPTS/M/2024 Tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, yang dirilis dalam situs resmi kementerian.

"Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 tentang Satuan Tugas Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku," bunyi beleid yang diteken Dody pada 26 Maret lalu.

Namun, berdasarkan penelusuran CNNIn-

donesia.com, tidak ditemukan dokumen aturan tentang satgas pembangunan IKN yang dicabut Dody, yakni Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/KPTS/M/2024 Tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN, dalam situs resmi kementerian.

Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN sendiri dibentuk oleh Menteri PUPR era Jokowi, Basuki Hadimuljono, pada 2021 lewat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1419/KPTS/M/2021 tentang Satgas Pembangunan Infrastruktur IKN.

Menyoal Dugaan Korupsi di Sejumlah Proyek

Dari Halaman 1

"Jelas itu juga harus dilakukan Rico Waas pada proyek drainase dan lampu pocong yang juga viral. Jadi ada rasa keadilan dilihat masyarakat Kota Medan pada kerja kerja Rico Waas yang positif," sambungnya.

Arief mengatakan semangat kerja Walikota Medan Rico Waas pasti mendapatkan dukungan dari seluruh lapisan masyarakat Kota Medan. Jika berani memerintahkan Inspektoral melakukan investigasi pada proyek tahun jamak yang sampai saat ini masih berbekas pada APBD Medan.

"Rico Waas jangan cemas apalagi was

was dengan perintah investigasi proyek masa kepemimpinan Bobby Nasution kemarin. Masyarakat Kota Medan pasti mendukung investigasi itu demi APBD Medan yang pro pembangunan," ujarnya.

Kader Demokrat ini juga membeberkan sejumlah objek anggaran yang harus mendapat perhatian khusus dari Walikota Medan Rico Waas. Selain anggaran pada OPD PU, Perkim, Pendidikan, Kesehatan, dan sosial, ada juga anggaran kelurahan yang besarnya sangat lumayan harus menjadi perhatian.

"Setiap tahun ada anggaran kelurahan yang besarnya miliaran rupiah. Jika dikali 151 kelurahan di Kota Medan, itu sangat besar

jumlahnya. Ini yang jarang diperhatikan, padahal ini menyentuh langsung permukiman masyarakat. Rico Waas harus paham," tegasnya.

Selain itu, Alumni Lemhannas ini juga menyarankan Rico Waas untuk memperhatikan perbatasan Kota Medan dengan Kabupaten Deliserdang. Selama ini pembangunan hanya terfokus di tengah kota tanpa memperhatikan daerah pinggiran.

"Saran ini hanya untuk mendukung kerja kerja Rico Waas, agar tidak dibilang melanjutkan yang sudah dibuat Bobby Nasution. Biar terlihat kerja Rico Waas yang peduli dengan masyarakat pinggiran," tandasnya. (A-10)

Perang Lawan Israel

Dari Halaman 1

Nasional Palestina di Islamabad, Kamis (10/4), Usmani mengatakan negara-negara Islam telah gagal memberikan dukungan yang cukup kepada mereka yang berjuang untuk melindungi Masjid Al Aqsa di Yerusalem.

"Apa gunanya militer negara-negara Muslim jika mereka tidak terlibat dalam jihad?" tanyanya, seperti dikutip Middle East Eye (MEE).

Usmani menekankan Muslim yang berniat melaksanakan ibadah secara sukarela seperti Umrah, mestinya menggunakan uang mereka untuk mendukung perjuangan Palestina.

"Kita telah berkumpul di dalam aula konvensi yang sama ini satu tahun yang lalu untuk mengukuhkan solidaritas dengan Palestina. Namun, sejak itu, kita hanya melakukan pertemuan, bukan aksi nyata," ujarnya.

Usmani lebih lanjut merujuk pada pernyataan pemimpin pertama Pakistan, Muhammad Ali Jinnah, yang menegaskan bahwa Israel adalah negara yang tidak sah.

"Sikap kami tidak akan berubah terlepas dari seberapa kuat Israel," pengkasnya.

Pakistan, yang didirikan pada tahun 1947 atau setahun sebelum Israel berdiri, telah menentang pembentukan Negeri Zionis dan tidak pernah mengakui kedaulatannya.

Pertemuan yang dihadiri Usmani ini sendiri dihadiri pula oleh para cendekiawan Islam terkemuka dari seluruh Pakistan. Mereka merilis deklarasi yang menyatakan jihad melawan Israel hukumnya wajib bagi semua negara Muslim.

Deklarasi ini mirip dengan fatwa Persatuan Ulama Muslim Internasional (IUMS) yang dirilis pada 4 April lalu. Fatwa IUMS juga meminta umat Islam seluruh dunia segera turun tangan secara militer, ekonomi, dan politik guna menghentikan genosida yang tengah dilancarkan Israel di Jalur Gaza, Palestina.

Fatwa IUMS didukung oleh 14 ulama Muslim terkemuka lainnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Muhammadiyah termasuk di antara organisasi Islam di Indonesia yang mendukung fatwa IUMS ini. (cnni/js)

Trump Naikkan Tarif

Dari Halaman 1

Kebijakan itu diumumkan Trump dalam lembar fakta yang dirilis Gedung Putih pada Selasa (15/4) waktu AS.

"Tarif yang lebih tinggi secara individual saat ini dihentikan sementara di tengah diskusi ini, kecuali untuk China, yang melakukan tindakan balasan," bunyi pernyataan tersebut.

Sementara itu, tarif resiprosal untuk negara lain akan ditunda selama 90 hari setelah banyak negara memulai pembicaraan dengan pemerintah AS untuk mencapai kesepakatan perdagangan.

Untuk saat ini, tarif dasar sebesar 10 persen akan berlaku untuk impor AS.

"Lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas perjanjian perdagangan baru," kata Gedung Putih.

Penerapan tarif 245 persen ini menandakan balasan terbaru dari AS terhadap kenaikan tarif yang dilayangkan China untuk barang-barang AS yang ingin masuk ke Negeri Tirai Bambu.

Dalam beberapa pekan terakhir, AS dan China saling balas meningkatkan tarif hingga membuat kondisi pasar global semakin menghadapi ketidakpastian.

Presiden China Xi Jinping mengumumkan kenaikan tarif untuk semua produk Negara Paman Sam yang masuk ke negaranya menjadi 125 persen. Ia pun mengaku tak pernah takut dengan ancaman tarif AS. (cnni/js)



Wibawa Mahkamah Agung

Dari Halaman 1

yang sehat, lembaga peradilan semestinya menjadi benteng terakhir keadilan. Namun, ketika putusan hukum bisa ditukar dengan segepok uang, maka keadilan kehilangan maknanya. Hukum tak lagi tegak lurus, tapi bengkok mengikuti arah kepentingan dan kekuasaan.

Keterlibatan hakim dalam praktik jual beli vonis menunjukkan bahwa mafia peradilan bukan lagi fenomena sporadis, tetapi telah membentuk ekosistem yang mengakar. Mereka tidak bekerja sendiri. Ada aktor di luar dan di dalam sistem, termasuk penegak hukum, pengacara, bahkan makelar perkara, yang membentuk jaring-jaring kolusi. Ini bukan hanya soal moral individu, tapi juga soal rapuhnya tata kelola peradilan.

ICW menegaskan, pembenahan Mahkamah Agung tak bisa ditunda. Ada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi menyeluruh: mulai dari pemetaan potensi korupsi di lembaga peradilan, pembenahan mekanisme pengawasan terhadap hakim, hingga kolaborasi strategis antara MA, Komisi Yudisial, KPK, dan masyarakat sipil. Tanpa transparansi dan kemauan politik yang kuat, semua hanya akan berhenti di meja rapat dan konferensi pers.

Mahkamah Agung perlu menyadari bahwa krisis kepercayaan publik sedang berlangsung. Ketika rakyat mulai merasa bahwa keadilan hanya milik yang berduit dan berkuasa, maka negara berada dalam ancaman delegitimasi. Dalam situasi semacam ini, setiap vonis bukan lagi simbol keadilan, melainkan produk transaksional.

Pemberhentian sementara terhadap para hakim tersangka merupakan langkah awal. Tapi publik menunggu langkah yang lebih berani: pemecatan tetap jika terbukti bersalah, transparansi proses hukum, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan dan pembinaan hakim. Mahkamah Agung harus menjadi garda terdepan dalam membersihkan tubuhnya sendiri — karena jika tidak, siapa lagi yang bisa kita percaya?

Skandal di tubuh peradilan juga memberi isyarat bahwa pendidikan hukum kita perlu ditinjau ulang. Integritas tidak dibentuk semata lewat hafalan pasal, tetapi ditanam sejak dini sebagai nilai hidup. Kampus hukum tidak boleh hanya mencetak teknokrat hukum, tetapi pembela keadilan yang berhati nurani. Pembaruan kurikulum dan etika profesi menjadi krusial.

Selain itu, publik sebagai pemilik kedaulatan harus terus bersuara. Masyarakat sipil, media, dan akademisi memiliki peran penting sebagai penjaga moral kekuasaan kehakiman. Tanpa tekanan publik, reformasi hanya menjadi wacana elitis yang tak menyentuh akar masalah. Demokrasi tak akan tumbuh tanpa partisipasi warga negara yang kritis dan peduli.

Di tengah ketidakpastian hukum dan melemahnya kepercayaan publik, harapan akan hadimaya peradilan yang bersih dan independen tidak boleh padam. Pembenahan Mahkamah Agung bukan semata-mata menyelamatkan satu institusi, tapi menyelamatkan kepercayaan rakyat pada negara hukum itu sendiri. (*)